



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**PENGARUH PENANAMAN MODAL DAN UPAH MINIMUM
TERHADAP TINGKAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI**

INDONESIA



Disusun oleh:

Annisa Sabrina Naulina/2104431059

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

PENGARUH PENANAMAN MODAL DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA



Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
Dari Politeknik Negeri Jakarta

Disusun oleh:
Annisa Sabrina Naulina/2104431059
**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Sabrina Naulina

NIM : 2104431059

Program Studi : Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 01 Juli 2025



Annisa Sabrina Naulina

NIM. 2104431059



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Annisa Sabrina Naulina
NIM : 2104431059
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : PENGARUH PENANAMAN MODAL DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

DEWAN PENGUJI

Ketua Pengaji : Indianik Aminah, S.E., M.M 

Anggota Pengaji : Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak., M.M., M.Ak 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

JAKARTA

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 1 Juli 2025

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E, M.M

NIP. 196404151990032002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK SIDANG AKHIR SKRIPSI

Pada tanggal 18/06/2025 skripsi yang disusun oleh:

Nama : Annisa Sabrina Naulina
NIM : 2104431059
Judul :

“Pengaruh Penanaman Modal dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia”

Telah disetujui untuk diteruskan ke tahap sidang akhir sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian.

Disetujui oleh:
Pembimbing

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA
Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak., M.M., M.Ak
NIP. 196901111998022001
Diketahui Oleh

KPS Program Studi

Tanggal 19 Juni 2025

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si
NIP. 197202221999031003



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur senantiasa dipanjangkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Penanaman Modal dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini sebagai syarat kelulusan Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak doa serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Sabar Warsini, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak., M.M., M.Ak selaku dosen pembimbingan yang telah memberikan arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan *staff* administrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta arahan selama kegiatan perkuliahan berlangsung.
6. Bapak Mauli dan Ibu Nurhayati selaku orang tua yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh teman-teman Akuntansi Keuangan Terapan Kelas B Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dan semangat selama kegiatan perkuliahan.
8. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi.

Skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Namun, disadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalam penyajian skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait topik yang dibahas.

Jakarta, 01 Juli 2025

Annisa Sabrina Naulina
NIM. 2104431059

AWS





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Annisa Sabrina Naulina
NIM	:	2104431059
Program Studi	:	Akuntansi Keuangan
Jurusan	:	Akuntansi
Jenis Karya	:	Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Penanaman Modal dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Juli 2025

Yang menyatakan

Annisa Sabrina Naulina



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pengaruh Penanaman Modal dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia

Annisa Sabrina Naulina

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu permasalahan utama dalam ketenagakerjaan yang terus terjadi di Indonesia dan memiliki dampak luas, baik terhadap pekerja, perusahaan, maupun perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), dan upah minimum terhadap tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yang diolah menggunakan *software e-views*. Sampel penelitian dipilih secara *purposive sampling*, dengan hasil sampel terpilih 10 provinsi di Indonesia pada tahun 2022-2024. Metode analisis yang digunakan adalah *random effect model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, PMDN, PMA, dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan. Namun, PMDN, PMA, dan upah minimum berpengaruh secara simultan.

Kata Kunci: Penanaman Modal, Upah Minimum, Pemutusan Hubungan Kerja



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The Effect of Investment and Minimum Wage on The Rate of Layoffs in Indonesia

Annisa Sabrina Naulina

Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

Layoffs are one of the main issues in employment that continue to occur in Indonesia and have a broad impact on workers, companies, and the national economy. This research aims to analyze the effect of domestic investment, foreign investment, and minimum wages on the rate of layoffs in Indonesia. The analytical method used in this research is panel data regression, processed using e-views software. The research sample was selected using purposive sampling, with the selected sample comprising 10 provinces in Indonesia from 2022-2024. The analysis method used is the random effect model (REM). The results of the research indicate that, partially, domestic investment, foreign investment, and minimum wages do not have a significant effect on layoffs. But, domestic investment, foreign investment, and minimum wages have a simultaneous effect on the layoff in Indonesia.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Keyword: Investment, Minimum Wages, Layoffs



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK SIDANG AKHIR SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	8
2.2 Penanaman Modal	9
2.3 Upah Minimum	10
2.4 Tenaga Kerja	11
2.5 Penelitian Terdahulu	11
2.6 Kerangka Pemikiran	15
2.7 Hipotesis	16
BAB 3 METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Objek Penelitian	19
3.3 Metode Pengambilan Sampel	19
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	20
3.5 Metode Pengumpulan Data Penelitian	21



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.6 Metode Analisis Data	21
3.6.1 Uji Statistik Data Panel	21
3.6.2 Persamaan Regresi Data Panel	22
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	22
3.6.4 Uji Hipotesis	24
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Hasil Penelitian	26
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	26
4.1.2 Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	28
4.1.3 Hasil Regresi REM	30
4.1.4 Uji Hipotesis.....	31
4.2 Pembahasan.....	33
4.2.1 Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja.....	32
4.2.2 Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja.....	34
4.2.3 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja.....	35
4.2.4 Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Upah Minimum Secara Simultan Terhadap Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja.....	36
4.3 Implikasi Penelitian.....	37
BAB 5 PENUTUP	39
5.1 Simpulan	39
5.2 Saran.....	39
DAFTAR REFERENSI.....	42
LAMPIRAN	45



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 16





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan Angkatan Kerja 2020-2024 (Juta Jiwa)	1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Sampel Penelitian	20
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	26
Tabel 4.2 Uji Chow	28
Tabel 4.3 Uji Hausman	29
Tabel 4.4 Uji Lagrange Multiplier (LM)	29
Tabel 4.5 Random Effect Model (REM)	30
Tabel 4.6 Uji T	31
Tabel 4.7 Uji F	32





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi PMDN Tahun 2022-2023	45
Lampiran 2 Realisasi PMA Tahun 2022-2023	46
Lampiran 3 Realisasi PMDN dan PMA Tahun 2024	47
Lampiran 4 Upah Minimum Provinsi Tahun 2022	48
Lampiran 5 Upah Minimum Provinsi Tahun 2023-2024	48
Lampiran 6 Jumlah Tenaga Kerja Terkena PHK Tahun 2022-2024	50
Lampiran 7 Olah Data E-views.....	51





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu negara berkembang dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas pasar tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi, kondisi global, dan kebijakan ekonomi yang tidak pasti sering berdampak langsung pada tingkat ketenagakerjaan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami persaingan ekonomi global yang semakin ketat, khususnya dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 1.1 Keadaan Angkatan Kerja 2020-2024 (Juta Jiwa)

Tahun	Angkatan Kerja	Lapangan Pekerjaan
2020	138,22	128,45
2021	140,15	131,05
2022	143,72	135,29
2023	147,71	139,85
2024	152,11	144,64

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut informasi yang dibagikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah angkatan kerja terus bertambah setiap tahunnya. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2024 yaitu mengalami kenaikan sebesar 4,4 juta jiwa dibandingkan tahun 2023. Peningkatan angkatan kerja yang terus bertambah ini tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan. Akibatnya, jumlah pengangguran semakin meningkat dan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin tinggi.

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 25 UU No. 13 Tahun 2003 PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja yang mengakibatkan berakhirnya hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. PHK menjadi salah satu permasalahan utama dalam ketenagakerjaan yang terus terjadi di Indonesia dan memiliki dampak luas, baik terhadap pekerja, perusahaan, maupun perekonomian nasional. Sejak pandemi Covid-19, angka PHK di Indonesia



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mengalami peningkatan di berbagai sektor. Meskipun perekonomian perlambatan mulai pulih, ancaman PHK masih tetap berlanjut akibat faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kondisi internal perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan PHK juga telah diatur dalam Pasal 154A UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, seperti restrukturisasi perusahaan, efisiensi perusahaan, perusahaan yang mengalami kerugian, keadaan memaksa (*force majeure*), pelanggaran atau kelalaian perusahaan, dan pelanggaran oleh pekerja.

Dalam menghadapi tantangan PHK, pemerintah dan perusahaan menerapkan berbagai kebijakan. Berdasarkan Pasal 46D UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, pemerintah mengeluarkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan kerja, bantuan finansial, dan akses informasi pasar kerja. Selain itu, program Kartu Prakerja juga ditujukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja. Kebijakan relaksasi pajak dan fasilitas pinjaman berbunga rendah bagi perusahaan juga diterapkan oleh pemerintah agar perusahaan dapat mempertahankan tenaga kerja. Selain pemerintah, beberapa perusahaan juga menerapkan kebijakan kerja fleksibel, seperti pengurangan jam kerja atau sistem kontrak kerja jangka pendek. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya PHK masal. Namun, implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ada masih belum efektif, seperti kerterbatasan akses program JKP, ketidaksesuaian antara pelatihan dengan keadaan lapangan, dan ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan tenaga kerja di bawah tekanan ekonomi yang berat.

Banyak faktor yang menyebabkan PHK masih terus terjadi di Indonesia, beberapa diantaranya yaitu penanaman modal dan upah minimum (Widiawati & Mafruhat, 2024). Modal merupakan salah satu komponen utama dalam operasional perusahaan baik untuk pembelian barang, ekspansi usaha, maupun menjaga likuiditas keuangan (Mankiw, 2021). Modal yang memadai dapat membuat perusahaan melakukan ekspansi bisnis dan menciptakan lapangan kerja baru. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) menjadi sumber utama bagi perusahaan di Indonesia. PMDN mendukung pemberdayaan sumber daya domestik dan stabilitas ekonomi, sedangkan PMA membawa teknologi canggih dan akses ke pasar global. Namun, ketidakpastian



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penanaman modal membuat perusahaan menunda pengembangan usaha atau relokasi operasional ke wilayah lain yang menyebabkan terjadinya PHK. Selain itu, kenaikan upah minimum yang tidak sebanding dengan kemampuan perusahaan juga menyebabkan efisiensi melalui PHK.

Sampai saat ini PHK masih terus terjadi terutama pada tahun 2024 dan 2025. Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terletak di Jawa Tengah, pada tahun 2023 mengalami kesulitan keuangan akibat utang yang meningkat dan penurunan permintaan pasar. Akibatnya per 31 Desember 2023 jumlah karyawan Sritex menurun 31,28%, dari 16.370 karyawan menjadi 11.249 karyawan (PT Sri Rejeki Isman Tbk, 2023). Pada tanggal 1 Maret 2025 Sritex resmi tutup dengan total lebih dari 10.000 karyawan yang terkena PHK. Sritex yang sebelumnya bergantung pada investasi atau penanaman modal untuk meningkatkan produksi hingga akhirnya mengalami tantangan ketika aliran penanaman modal domestik maupun asing tidak mencukupi untuk menutup beban utang dan meningkatkan daya saing pasar global, sehingga perusahaan melakukan PHK. Selain itu PHK juga terjadi di Banten, pada awal tahun 2025 PT Adis Dimension Footwear melakukan hubungan kerja dengan 1.500 karyawan, sementara PT Victory Ching Luh melakukan PHK terhadap 2.000 karyawan (Adri, 2025). PHK terjadi karena kedua perusahaan tersebut melakukan relokasi pabrik ke wilayah yang memiliki upah minimum lebih rendah dibandingkan lokasi pabrik sebelumnya. Fenomena PHK yang ada menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan masih belum efektif dalam mengurangi angka PHK.

Kasus yang terjadi pada Sritex, PT Victory Ching Luh, dan PT Adis Dimension Footwear mencerminkan tantangan ketenagakerjaan di wilayah padat penduduk, yaitu Jawa Barat dan Banten. Untuk meneliti fenomena ini, penelitian ini memilih 10 provinsi yang termasuk ke dalam 15 besar penduduk terbanyak menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seperti Jawa Barat dengan lebih dari 50 juta jiwa dan termasuk sebagai wilayah dengan PHK tertinggi (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi yang memiliki penduduk terbanyak seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta memiliki angkatan kerja yang besar, sehingga lebih rentan terhadap tingkat fluktuasi PHK.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya PHK. Widiawati dan Mafruhat (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, maka penanaman modal dalam negeri dapat menurunkan tingkat PHK. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Asmara, Saleh & Asmara (2024) menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berpengaruh positif pada peningkatan PHK. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Iksan, Arifin & Suliswanto et al (2020) menunjukkan upah minimum berpengaruh negatif terhadap peningkatan PHK.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut menggambarkan hubungan antara penanaman modal dan upah minimum dengan kondisi pasar tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja dan tingkat PHK merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan. Terdapat hubungan berbanding terbalik antara tingkat penyerapan tenaga kerja dengan tingkat PHK. Ketika penyerapan tenaga kerja meningkat hal tersebut menunjukkan kondisi ekonomi yang baik sehingga resiko PHK menjadi lebih rendah. Sebaliknya, rendahnya penyerapan tenaga kerja menunjukkan kondisi ekonomi yang menurun sehingga mendorong terjadinya peningkatan PHK (Baley, Ljungqvist, & Sargent, 2023).

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu dan kondisi pasar tenaga kerja, masih terdapat perbedaan mengenai penanaman modal dan upah minimum memengaruhi tingkat PHK, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan penanaman modal dan upah minimum terhadap tingkat PHK di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode analisis regresi data panel untuk mengidentifikasi penanaman modal dan upah minimum memengaruhi tingkat PHK di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

PHK masih menjadi permasalahan utama dalam ketenagakerjaan di Indonesia, meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan seperti program JKP dan Kartu Prakerja. Ketidakefektifan dari kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa PHK dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, seperti ketidakstabilan ekonomi, kebangkrutan perusahaan, restrukturisasi, relokasi, dan efisiensi biaya. Di antara berbagai faktor tersebut, Penanaman Modal



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan kebijakan upah minimum menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan ketenagakerjaan perusahaan (Widiawati & Mafruhat, 2024).

PMDN dan PMA ikut berperan dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia, tetapi penurunan investasi atau penanaman modal akibat ketidakpastian ekonomi atau kebijakan yang kurang mendukung dapat menyebabkan perusahaan mengurangi kegiatan operasional sehingga meningkatkan angka PHK sebagai bentuk efisiensi biaya. Selain itu, kebijakan upah minimum yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi dapat menambah biaya tenaga kerja dan menimbulkan tantangan dalam menyesuaikan biaya operasional bagi perusahaan. Jika kenaikan upah minimum yang tidak sebanding dengan produktivitas perusahaan maka dapat memicu terjadinya efisiensi biaya operasional melalui PHK. PHK yang dilakukan untuk efisiensi biaya, baik akibat penurunan modal maupun kenaikan upah, berdampak terhadap keadaan ekonomi nasional, kinerja tenaga kerja, dan kegiatan operasional perusahaan (Hasibuan, Dotulong, & Uhing, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas pengaruh penanaman modal dan upah minimum terhadap tingkat PHK di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka timbulah pertanyaan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PMDN terhadap tingkat PHK di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh PMA terhadap tingkat PHK di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat PHK di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh PMDN, PMA, dan upah minimum secara simultan terhadap tingkat PHK di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh PMDN terhadap tingkat PHK di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh PMA terhadap tingkat PHK di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat PHK di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh PMDN, PMA, dan upah minimum secara simultan terhadap tingkat PHK di Indonesia.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan mengenai hubungan antara penanaman modal dan upah minimum terhadap tingkat PHK di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat PHK.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam menetapkan upah minimum yang selaras dengan kegiatan penanaman modal untuk meminimalkan terjadinya PHK, serta membantu perusahaan dan tenaga kerja memahami faktor penyebab PHK dan menemukan solusi untuk mengurangi angka PHK.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam pemilihan topik penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penjelasan penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan untuk melakukan penelitian seperti jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian terkait pengaruh penanaman modal dan upah minimum terhadap tingkat pemutusan hubungan kerja.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai penanaman modal, dan upah minimum terhadap tingkat pemutusan hubungan kerja.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian pengaruh PMDN, PMA, dan upah minimum terhadap tingkat PHK di Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PMDN tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat PHK. Hal ini disebabkan oleh alokasi PMDN yang cenderung lebih banyak ke sektor padat modal seperti keuangan dan properti yang menyerap tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan sektor padat karya.
2. PMA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat PHK. Penyebabnya adalah PMA cenderung berfokus pada sektor padat modal seperti pertambangan dan energi yang lebih mengandalkan teknologi daripada sumber daya manusia. Selain itu, perusahaan multinasional sering menggunakan sistem kerja kontrak atau *outsourcing*, sehingga dampak PMA terhadap pengurangan PHK menjadi terbatas. PMA juga memiliki sifat jangka panjang dan belum sepenuhnya teralisis dalam periode penelitian.
3. Upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat PHK. Hal ini disebabkan kemampuan perusahaan menyesuaikan biaya operasional melalui efisiensi non-tenaga kerja, seperti peningkatan produktivitas atau pemangkasan biaya lainnya. Kebijakan pemerintah, seperti insentif pajak dan subsidi turut membantu perusahaan mempertahankan tenaga kerja meskipun upah minimum mengalami kenaikan.
4. PMDN, PMA, dan upah minimum secara simultan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat PHK. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi PMDN, PMA, dan upah minimum cukup untuk mempengaruhi tingkat PHK dan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat PHK. Namun, sebagian besar PHK dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kondisi ekonomi global, kebangkrutan perusahaan, atau relokasi pabrik.

5.2 Saran

Terdapat beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil akhir dari penelitian, khususnya terkait dengan sumber data dan jangka waktu yang digunakan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dalam penelitian. Beberapa saran ditujukan untuk memperbarui pendekatan yang digunakan serta memberikan arahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai topik penelitian ini.

1. Bagi pemerintah:

Pemerintah perlu menyalurkan PMDN dan PMA ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga memengaruhi tingkat PHK. Selain itu, program pelatihan seperti Kartu Prakerja juga perlu dikaji lebih lanjut untuk membantu pekerja terdampak PHK dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang baru. Pemerintah juga perlu menyusun kebijakan peningkatan investasi dengan pengaturan upah minimum yang mempertimbangkan kemampuan sektor usaha. Selain itu, diperlukan perhatian khusus pada provinsi-provinsi dengan nilai penanaman modal rendah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Dengan rendahnya PMDN dan PMA menyebabkan keterbatasan lapangan kerja dan tingginya risiko PHK. Oleh karena itu, perlu adanya insentif khusus, kemudahan perizinan, peningkatan infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja lokal di wilayah tersebut agar dapat menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan berdaya saing.

2. Bagi pelaku usaha:

Para pelaku usaha disarankan untuk menyusun perencanaan jangka panjang dalam menanggapi peningkatan upah minimum, guna menjaga keberlanjutan operasional dan mengurangi kemungkinan terjadinya PHK. Selain itu, disarankan untuk memperkuat manajemen sumber daya manusia dengan menyediakan pelatihan bagi tenaga kerja, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar.

3. Bagi peneliti selanjutnya:

Peneliti selanjutnya dapat memasukkan variabel lain yang berpotensi berpengaruh signifikan seperti variabel inflasi yang dapat berpengaruh signifikan karena inflasi berkaitan dengan daya beli masyarakat sehingga mendorong permintaan pasar dan memperbesar peluang kerja bukan melakukan PHK. Selain itu, variabel produk domestik regional bruto (PDRB) juga dapat berpengaruh karena PDRB mencerminkan kondisi ekonomi dan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

variabel teknologi yang dapat mendorong otomatisasi dan efisiensi bagi perusahaan.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR REFERENSI

- Adri, A. (2025, Maret 10). *Dua Pabrik Sepatu di Banten Direlokasi, Ribuan Pekerja Terkena PHK*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/artikel/dua-pabrik-sepatu-direlokasi-ribuan-pekerja-di-banten-di-phk>
- Agustin, P., & Permatasari, R. I. (2020). Pengaruh Pendidikan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Divisi New Product Development (NPD) Pada PT Mayora Indah Tbk. *Jurnal Ilmiah M-Progress*.
- Alfajri, M. D. (2024). Analisis Komprehensif Pengaruh Risk Rating dan Leverage Terhadap Firm Value Serta Implikasinya Pada IDXESGL. *Repository PNJ*.
- Aprillia, D. D., Sianturi, A. P., & Rizal, M. (2025). Implementasi Anggaran Tenaga Kerja Dalam Perencanaan Keuangan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*.
- Asmara, G. D., Saleh, R., & Asmara, G. J. (2024). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2015-2020. *Journal of Advances in Accounting, Economics, and Management*.
- Badan Pusat Statistik. (2024, September 20). *Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa)*, 2024. Retrieved from Badan Pusat Statistik.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024, Oktober 19). *Permasalahan Investasi di Daerah adanya Ketimpangan Sebaran Investasi di Indonesia*. Retrieved from Brin.go.id: <https://brin.go.id/drid/posts/kabar/permasalahan-investasi-di-daerah-adanya-ketimpangan-sebaran-investasi-di-indonesia>
- Baley, I., Ljungqvist, L., & Sargent, T. J. (2023). Cross-phenomenon restrictions: Unemployment effects of. *Economic Dynamics*.
- Binus University School of Accounting. (n.d.). *Memahami Uji F (Uji Simultan) Dalam Regresi Linear*. Retrieved from Binus University School of Accounting: <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-uji-f-iji-simultan-dalam-regresi-linear/>
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. (2024). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Djunaidi, & Alfitri. (2022). Dilema industri padat modal dan tuntutan tenaga kerja lokal. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*.
- Farhansyah, J. (2025, April 29). *Hiring Freeze: Penyebab, dan Strategi HR dalam Menghadapinya*. Retrieved from Mekari Talenta: <https://www.talenta.co/blog/hiring-freeze/>
- Hasibuan, E. F., Dotulong, L. O., & Uhing, Y. (2023). Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Terhadap Kinerja



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Karyawan Pada PT Mahakarya Cipta Nusantara Timika Papua. *Jurnal EMBA*.

Helvira, R., & Rizki, E. P. (2020). Pengaruh Investasi, Upah Minimum, dan IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat. *Journal of Islamic Economics and Business*.

Iksan, S. A., Arifin, Z., & Suliswanto, M. W. (2020). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*.

Karimah, L. N., Shafwan, V. A.-F., & Tambunan, N. (2023). Analisis Inflasi Terhadap Pengangguran di Indonesia. *Community Development Journal*.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi. (2025, Januari 31). *Realisasi Investasi TW IV dan Periode Januari-Desember 2024*. Retrieved from Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM: <https://bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi>

Kementerian Ketenagakerjaan. (2020, Oktober 26). *Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19 (April - Agustus 2020)*. Retrieved from Satudata Kemnaker: <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/55>

Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics*. Cengage Learning.

Mataso, L. R. (2022). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia (2012-2021). *E-Journal UAJY*.

Novitasari, D. (2022). *Manajemen Operasi Konsep & Esensi*. Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha.

Pakpahan, A. F., Prasetyo, A., Gurning, E. S., Situmorang, R. F., Sipayung, T. P., Sesilia, A. P., . . . Rantung, G. A. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis.

Pasaribu, D., Situmorang, C. V., Darmayanti, N., Triyani, Y., Heningtyas, O. S., Astuti, E. B., . . . Silvera, D. L. (2023). *Metodologi Penelitian Akuntansi Dan Manajemen Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.

Prabowo, B., Samsudin, A., Setiawan, W. A., Ramadhani, N. F., Panggabean, E. N., & Ammarullah, N. (2024). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. *Indomera*.

PT Astra International Tbk. (2022). *Annual Report 2022*. PT Astra International Tbk.

PT Sri Rejeki Isman Tbk. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. PT Sri Rejeki Isman Tbk.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Putri, R. N., & Shidiqie, J. S. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2015-2020 . *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*.
- Soekanto, S. (2021). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmawati, U. S., Rindiani, & Ananda, T. S. (2022). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Kalimantan Barat Periode 2017-2021. *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*.
- Tempo. (2024, Desember 6). *Dampak UMP Naik 6,5 Persen Pemerintah Beri Insentif Industri dengan Bebaskan Pajak Barang Mewah dan PPN*. Retrieved from tempo.co: <https://www.tempo.co/ekonomi/dampak-ump-naik-6-5-persen-pemerintah-beri-insentif-industri-dengan-bebaskan-pajak-barang-mewah-dan-ppn-1177914>
- Tyas, N. H. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Harga Saham Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2018. *Repository STEI*.
- Widiawati, L., & Mafruhat, A. Y. (2024). Pengaruh Penanaman Modal Asing, dalam Negeri, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIEB)*.
- World Bank. (2020). *Global Investment Competitiveness Report 2019/2020*. Washington DC: The World Bank.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi PMDN Tahun 2022-2023

No	38 Provinsi	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Miliar Rupiah)	
		2022	2023
1	ACEH	4.424,20	8.883,30
2	SUMATERA UTARA	22.789,20	21.574,00
3	SUMATERA BARAT	2.559,80	4.488,20
4	RIAU	43.062,00	48.243,30
5	JAMBI	8.882,70	8.939,00
6	SUMATERA SELATAN	23.526,00	25.602,40
7	BENGKULU	6.957,30	7.218,70
8	LAMPUNG	5.809,20	7.625,80
9	KEP. BANGKA BELITUNG	6.309,00	7.961,40
10	KEP. RIAU	4.817,40	8.856,60
11	DKI JAKARTA	89.223,60	95.202,10
12	JAWA BARAT	80.808,30	88.012,90
13	JAWA TENGAH	24.992,30	32.987,20
14	DI YOGYAKARTA	2.275,00	5.015,50
15	JAWA TIMUR	65.355,90	74.937,40
16	BANTEN	31.283,90	37.971,70
17	BALI	6.002,10	6.950,80
18	NUSA TENGGARA BARAT	11.031,50	30.766,20
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.459,30	3.407,20
20	KALIMANTAN BARAT	9.382,90	14.892,00
21	KALIMANTAN TENGAH	6.556,80	8.779,50
22	KALIMANTAN SELATAN	12.310,40	14.909,40
23	KALIMANTAN TIMUR	39.595,60	52.171,70
24	KALIMANTAN UTARA	7.526,40	8.199,10
25	SULAWESI UTARA	5.042,10	7.698,20
26	SULAWESI TENGAH	3.758,60	4.772,50
27	SULAWESI SELATAN	7.528,00	11.468,30
28	SULAWESI TENGGARA	7.596,00	7.734,60
29	GORONTALO	1.113,50	3.960,10
30	SULAWESI BARAT	1.313,30	2.011,10
31	MALUKU	611,00	1.904,50
32	MALUKU UTARA	3.414,90	6.901,00
33	PAPUA BARAT	2.139,10	1.261,90
34	PAPUA BARAT DAYA	-	1.708,70
35	PAPUA	1.311,80	1.174,10
36	PAPUA SELATAN	-	152,50
37	PAPUA TENGAH	-	458,80
38	PAPUA PEGUNUNGAN	-	121,80



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Realisasi PMA Tahun 2022-2023

No	38 Provinsi	Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Menurut Provinsi (Juta US\$)			
		Proyek		Investasi	
		2022	2023	2022	2023
1	ACEH	89,00	210,00	127,60	248,60
2	SUMATERA UTARA	765,00	1.253,00	1.316,10	1.181,30
3	SUMATERA BARAT	197,00	308,00	95,60	120,70
4	RIAU	318,00	600,00	2.748,70	2.042,30
5	JAMBI	159,00	251,00	39,20	45,10
6	SUMATERA SELATAN	288,00	456,00	1.226,30	1.478,60
7	BENGKULU	57,00	101,00	52,20	76,10
8	LAMPUNG	215,00	372,00	247,80	220,60
9	KEP. BANGKA BELITUNG	125,00	207,00	129,70	72,50
10	KEP. RIAU	1.042,00	1.753,00	934,00	764,10
11	DKI JAKARTA	8.942,00	20.028,00	3.744,10	4.830,00
12	JAWA BARAT	6.208,00	10.512,00	6.534,50	8.283,70
13	JAWA TENGAH	1.451,00	3.021,00	2.362,00	1.563,70
14	DI YOGYAKARTA	289,00	531,00	113,90	46,00
15	JAWA TIMUR	2.105,00	3.913,00	3.134,00	4.741,00
16	BANTEN	2.240,00	4.775,00	3.410,70	4.451,60
17	BALI	4.696,00	16.282,00	449,50	808,50
18	NUSA TENGGARA BARAT	808,00	1.571,00	704,60	468,40
19	NUSA TENGGARA TIMUR	281,00	466,00	73,30	124,30
20	KALIMANTAN BARAT	340,00	498,00	745,50	490,50
21	KALIMANTAN TENGAH	238,00	403,00	548,30	697,60
22	KALIMANTAN SELATAN	174,00	357,00	208,10	327,90
23	KALIMANTAN TIMUR	486,00	822,00	1.266,20	1.332,70
24	KALIMANTAN UTARA	68,00	135,00	430,50	1.272,10
25	SULAWESI UTARA	151,00	277,00	105,10	203,70
26	SULAWESI TENGAH	216,00	397,00	7.486,00	7.244,10
27	SULAWESI SELATAN	275,00	515,00	469,00	336,70
28	SULAWESI TENGGARA	102,00	207,00	877,90	448,30
29	GORONTALO	30,00	57,00	102,90	33,80
30	SULAWESI BARAT	19,00	45,00	28,30	24,30
31	MALUKU	41,00	63,00	73,40	106,30



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Realisasi PMDN dan PMA Tahun 2024

Peringkat Realisasi Januari-Desember 2024: Berdasarkan Lokasi

PMDN				PMA			
No	Provinsi	Investasi (Rp. Miliar)	Proyek	No	Provinsi	Investasi (US\$. Juta)	Proyek
1	Jakarta	128.402,1	173.185	1	Jawa Barat	9.972,3	22.450
2	Jawa Barat	101.552,3	80.559	2	Sulawesi Tengah	9.019,3	879
3	Jawa Timur	92.410,1	58.758	3	Jakarta	7.563,4	48.470
4	Riau	61.097,6	10.082	4	Maluku Utara	4.392,4	423
5	Kalimantan Timur	55.078,9	15.390	5	Banten	3.868,2	11.236
6	Banten	47.605,8	36.320	6	Jawa Timur	3.661,1	8.544
7	Nusa Tenggara Barat	43.385,0	5.565	7	Kepulauan Riau	2.483,0	4.007
8	Sumatera Selatan	36.671,4	11.521	8	Jawa Tengah	2.358,0	6.689
9	Jawa Tengah	33.298,7	33.960	9	Sumatera Selatan	2.283,3	899
10	Sumatera Utara	22.445,7	16.459	10	Riau	1.813,3	1.209
11	Kalimantan Selatan	16.579,3	7.123	11	Sumatera Utara	1.721,7	2.363
12	Kepulauan Bangka Belitung	15.724,8	3.633	12	Bali	1.613,7	42.926
13	Kalimantan Barat	15.416,1	8.433	13	Papua Tengah	1.496,8	92
14	Kalimantan Tengah	15.229,3	5.157	14	Kalimantan Timur	1.417,1	1.727
15	Bali	12.312,3	12.836	15	Kalimantan Utara	1.347,7	234
16	Kalimantan Utara	11.924,5	1.794	16	Papua Barat	777,3	155
17	Kepulauan Riau	10.017,4	10.329	17	Nusa Tenggara Barat	651,0	3.991
18	Jambi	9.986,2	5.871	18	Kalimantan Barat	616,0	959
19	Maluku Utara	9.134,8	2.610	19	Kalimantan Selatan	551,4	638
20	Sulawesi Selatan	8.412,0	14.279	20	Kalimantan Tengah	419,1	824
21	Aceh	8.317,0	9.456	21	Sulawesi Selatan	374,9	1.089
22	Bengkulu	7.982,5	2.500	22	Sulawesi Tenggara	369,1	430
23	Sumatera Barat	7.956,3	4.701	23	Lampung	162,9	754
24	Lampung	7.218,0	8.256	24	Maluku	120,7	107
25	Sulawesi Utara	5.783,9	5.884	25	Sumatera Barat	115,9	832
26	Sulawesi Tenggara	5.517,3	4.247	26	Sulawesi Utara	112,4	562
27	Sulawesi Tengah	4.593,0	5.081	27	Nusa Tenggara Timur	106,1	1.102
28	Gorontalo	4.003,9	1.858	28	Jambi	105,6	442
29	Daerah Istimewa Yogyakarta	3.630,2	6.455	29	Kepulauan Bangka Belitung	102,3	415
30	Sulawesi Barat	2.893,0	1.795	30	Papua Selatan	90,3	124
31	Nusa Tenggara Timur	2.625,5	4.645	31	Bengkulu	86,7	156
32	Papua Barat Daya	1.765,4	1.679	32	Papua Barat Daya	82,8	114
33	Maluku	1.569,5	2.725	33	Aceh	76,7	430
34	Papua Barat	1.377,9	1.361	34	Daerah Istimewa Yogyakarta	35,4	1.004
35	Papua	974,8	1.978	35	Gorontalo	34,9	108
36	Papua Selatan	699,7	712	36	Papua	8,7	174
37	Papua Tengah	343,5	1.275	37	Sulawesi Barat	2,2	92
38	Papua Pegunungan	82,0	138	TOTAL		60.014,0	166.650
	TOTAL	814.017,7	578.610				

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Upah Minimum Provinsi Tahun 2022

UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI INDONESIA TAHUN 2022		
No.	Provinsi	Tahun 2022 (Rp)
1	Aceh	3.166.460,00
2	Sumatera Utara	2.522.609,94
3	Sumatera Barat	2.512.539,00
4	Riau	2.938.564,01
5	Jambi	2.698.940,87
6	Sumatera Selatan	3.144.446,00
7	Bengkulu	2.238.094,31
8	Lampung	2.440.486,18
9	Bangka Belitung	3.264.884,00
10	Kepulauan Riau	3.050.172,00
11	DKI Jakarta	4.641.854,00
12	Jawa Barat	1.841.487,31
13	Jawa Tengah	1.812.935,43
14	DI. Yogyakarta	1.840.915,53
15	Jawa Timur	1.891.567,12
16	Banten	2.501.203,11
17	Bali	2.516.971,00
18	Nusa Tenggara Barat	2.207.212,00
19	Nusa Tenggara Timur	1.975.000,00
20	Kalimantan Barat	2.434.328,19
21	Kalimantan Tengah	2.922.516,00
22	Kalimantan Selatan	2.906.473,32
23	Kalimantan Timur	3.014.497,22
24	Kalimantan Utara	3.016.738,00
25	Sulawesi Utara	3.310.723,00
26	Sulawesi Tengah	2.390.739,00
27	Sulawesi Selatan	3.165.876,00
28	Sulawesi Tenggara	2.576.016,96
29	Gorontalo	2.800.580,00
30	Sulawesi Barat	2.678.863,10
31	Maluku	2.619.312,83
32	Maluku Utara	2.862.231,00
33	Papua Barat	3.200.000,00
34	Papua	3.561.932,00

Sumber : Ditjen. PII dan JSK, Kemnaker. Data per 8 Februari 2022



Lampiran 5 Upah Minimum Provinsi Tahun 2023-2024

No	Provinsi	UMP 2023 (Rp)	UMP 2024 (Rp)
1	Aceh	3.413.666,00	3.460.672,00
2	Sumatera Utara	2.710.493,93	2.809.915,00
3	Sumatera Barat	2.742.476,00	2.811.449,27
4	Riau	3.191.662,53	3.294.625,56
5	Jambi	2.943.033,08	3.037.121,85
6	Sumatera Selatan	3.404.177,24	3.456.874,00
7	Bengkulu	2.418.280,00	2.507.079,24
8	Lampung	2.633.284,59	2.716.497,00
9	Bangka Belitung	3.498.479,00	3.640.000,00
10	Kepulauan Riau	3.279.194,00	3.402.492,00
11	DKI Jakarta	4.901.798,00	5.067.381,00
12	Jawa Barat	1.986.670,17	2.057.495,00
13	Jawa Tengah	1.958.169,69	2.036.947,00
14	DI. Yogyakarta	1.981.782,39	2.125.897,61
15	Jawa Timur	2.040.244,30	2.165.244,30
16	Banten	2.661.280,11	2.727.812,11

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

17	Bali	2.713.672,28	2.813.672,00
18	Nusa Tenggara Barat	2.371.407,00	2.444.067,00
19	Nusa Tenggara Timur	2.123.994,00	2.186.826,00
20	Kalimantan Barat	2.608.601,75	2.702.616,00
21	Kalimantan Tengah	3.181.013,00	3.261.616,00
22	Kalimantan Selatan	3.149.977,65	3.282.812,21
23	Kalimantan Timur	3.201.396,04	3.360.858,00
24	Kalimantan Utara	3.251.702,67	3.361.653,00
25	Sulawesi Utara	3.485.000,00	3.545.000,00
26	Sulawesi Tengah	2.599.546,00	2.736.698,00
27	Sulawesi Selatan	3.385.145,00	3.434.298,00
28	Sulawesi Tenggara	2.758.984,54	2.885.964,04
29	Gorontalo	2.989.350,00	3.025.100,00
30	Sulawesi Barat	2.871.794,82	2.914.958,08
31	Maluku	2.812.827,66	2.949.953,00
32	Maluku Utara	2.976.720,00	3.200.000,00
33	Papua Barat	3.282.000,00	3.393.500,00
34	Papua	3.864.696,00	4.024.270,00
35	Papua Tengah	-	4.024.270,00
36	Papua Pegunungan	-	4.024.270,00
37	Papua Selatan	-	4.024.270,00
38	Papua Barat Daya	-	3.393.500,00

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6 Jumlah Tenaga Kerja Terkena PHK Tahun 2022-2024

No.	Provinsi	TK ter-PHK 2022	TK ter-PHK 2023	TK ter-PHK 2024
1	Aceh	84	666	486
2	Sumatera Utara	70	2.716	761
3	Sumatera Barat	35	692	671
4	Riau	916	11.242	1.153
5	Jambi	92	2.054	323
6	Sumatera Selatan	160	1.355	715
7	Bengkulu	26	117	109
8	Lampung	30	454	143
9	Bangka Belitung	380	992	1.908
10	Kepulauan Riau	863	2.714	654
11	DKI Jakarta	1.655	10.615	17.085
12	Jawa Barat	4.629	125.743	10.661
13	Jawa Tengah	467	69.286	13.130
14	DI. Yogyakarta	113	5.298	2.699
15	Jawa Timur	3.574	11.042	5.327
16	Banten	3.703	61.161	13.042
17	Bali	706	627	73
18	Nusa Tenggara Barat	396	630	205
19	Nusa Tenggara Timur	62	148	27
20	Kalimantan Barat	1.131	3.406	786
21	Kalimantan Tengah	37	1.469	825
22	Kalimantan Selatan	1.199	13.169	864
23	Kalimantan Timur	3.082	7.996	699
24	Kalimantan Utara	238	7.578	1.413
25	Sulawesi Utara	558	201	126
26	Sulawesi Tengah	35	9.669	2.055
27	Sulawesi Selatan	191	4.460	482
28	Sulawesi Tenggara	74	1.147	1.168
29	Gorontalo	171	1.958	87
30	Sulawesi Barat	34	29	14
31	Maluku	195	404	257
32	Maluku Utara	8	632	17
33	Papua Barat	124	132	-
34	Papua	76	56	-
Jumlah		25.114	359.858	77.965



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7 Olah Data E-views

CODE	YEARS	PMDN	PMA	UPAH MINIMUM	PHK
Sumatera Utara	2022	22789200,00	18886035,00	2522609,94	70
Sumatera Utara	2023	21574000,00	17483240,00	2710493,93	2716
Sumatera Utara	2024	22445700,00	25825500,00	2809915,00	761
Riau	2022	43062000,00	39443845,00	2938564,01	916
Riau	2023	48243300,00	30226040,00	3191662,53	11242
Riau	2024	61097600,00	27199500,00	3294625,56	1153
DKI Jakarta	2022	89223600,00	53727835,00	4641854,00	1655
DKI Jakarta	2023	95202100,00	71484000,00	4901798,00	10615
DKI Jakarta	2024	128402100,00	113451000,00	5067381,00	17085
Banten	2022	31283900,00	48943545,00	2501203,11	3703
Banten	2023	37971700,00	65883680,00	2661280,11	61161
Banten	2024	47605800,00	58023000,00	2727812,11	13042
Jawa Barat	2022	80808300,00	93770075,00	1841487,31	4629
Jawa Barat	2023	88012900,00	122598760,00	1986670,17	125743
Jawa Barat	2024	101552100,00	149584500,00	2057495,00	1066
Jawa Tengah	2022	24992300,00	33894700,00	1812935,43	467
Jawa Tengah	2023	32987200,00	23142760,00	1958169,69	69286
Jawa Tengah	2024	33298700,00	35370000,00	2036947,00	13130
Jawa Timur	2022	65355900,00	44972900,00	1891567,12	3574
Jawa Timur	2023	74937400,00	70166800,00	2040244,30	11042
Jawa Timur	2024	92410100,00	54916500,00	2165244,30	5327
Nusa Tenggara Barat	2022	11031500,00	10111010,00	2207212,00	396
Nusa Tenggara Barat	2023	30766200,00	6932320,00	2371407,00	630
Nusa Tenggara Barat	2024	43385000,00	9765000,00	2444067,00	205
Kalimantan Barat	2022	9382900,00	10697925,00	2434328,19	1131



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kalimantan Barat	2023	14892000,00	7259400,00	2608601,75	3406
Kalimantan Barat	2024	15416100,00	9240000,00	2702616,00	786
Sulawesi Selatan	2022	7528000,00	6730150,00	3165876,00	191
Sulawesi Selatan	2023	11468300,00	4983160,00	3385145,00	4460
Sulawesi Selatan	2024	8412000,00	5623500,00	3434298,00	482

